

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi. Secara simultan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Indonesia selama periode 2017-2023. Pengukuran ketimpangan wilayah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson, sedangkan analisis hubungan antarvariabel dilakukan melalui metode data panel dengan model *Random Fixed Effect Model* (REM).

Berdasarkan rangkaian analisis yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. IPM tidak menunjukkan pengaruh yang bermakna secara statistik terhadap ketimpangan antarwilayah di Indonesia selama periode 2017-2023. Temuan ini mengindikasikan bahwa pergeseran nilai IPM belum mampu menjelaskan perbedaan tingkat ketimpangan daerah secara signifikan. Kondisi tersebut terjadi lantaran pertumbuhan IPM berlangsung homogen di berbagai provinsi sehingga mengurangi daya pembedanya, selain itu peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap pemerataan pembangunan karena manfaatnya dapat memerlukan waktu untuk tercermin dalam kondisi ekonomi dan pembangunan wilayah.
2. PAD menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan kapasitas fiskal yang sangat besar antar provinsi di Indonesia. Provinsi dengan PAD yang tinggi lebih mampu mendukung berbagai program pembangunan, membangun infrastruktur, dan menyediakan layanan publik secara mandiri. Sebaliknya provinsi dengan PAD yang relatif rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mendanai kebutuhan pembangunan daerah sehingga

masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Perbedaan kemampuan fiskal tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah, di mana wilayah yang memiliki sumber pendapatan lebih besar dapat berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, maka ketimpangan wilayah antar provinsi berpotensi semakin meningkat.

3. Di Indonesia, peningkatan pertumbuhan ekonomi terbukti memicu kenaikan ketimpangan antarwilayah secara signifikan. Temuan ini sejalan dengan kerangka teori neoklasik Solow-Swan, yang menegaskan bahwa modal, tenaga kerja, serta inovasi teknologi merupakan pilar utama dinamika ekonomi. Akibat ketimpangan kapasitas setiap daerah dalam mengoptimalkan ketiga elemen tersebut, laju ekspansi ekonomi antarprovinsi menjadi tidak seragam. Wilayah dengan produktivitas tinggi akan tumbuh jauh lebih pesat, yang pada akhirnya memusatkan pusat-pusat pertumbuhan pada daerah tertentu dan melebarkan jurang ketimpangan regional.

5.2 Saran

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ada, terdapat sejumlah saran yang dapat diajukan yaitu:

1. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu memastikan bahwa peningkatan IPM yang terjadi tidak hanya bersifat kuantitas angka, melainkan juga berdampak nyata pada produktivitas dan daya saing ekonomi masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di provinsi-provinsi tertinggal, khususnya di wilayah Timur Indonesia seperti Papua, NTT, dan Maluku, agar peningkatan IPM di daerah tersebut dapat dikonversi menjadi aktivitas ekonomi yang produktif. Selain itu, pemerintah perlu merancang kebijakan yang memastikan lulusan pendidikan di daerah tertinggal memiliki akses terhadap lapangan kerja berkualitas di wilayahnya sendiri, sehingga manfaat peningkatan IPM tidak hanya terserap di wilayah-wilayah yang sudah lebih maju.

2. Pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan pemerataan fiskal melalui pengalokasian dana transfer yang lebih efektif dan tepat sasaran, terutama kepada provinsi-provinsi yang memiliki kapasitas fiskal relatif rendah. Optimalisasi dana transfer tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan pembangunan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penyediaan pelayanan publik yang lebih merata antar wilayah. Selain itu, pemerintah daerah harus meningkatkan autonomi keuangan mereka dengan memaksimalkan PAD mereka. Kapasitas fiskal daerah yang lebih besar memungkinkan pemerintah daerah untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dengan lebih baik, yang berarti mereka dapat mengurangi ketergantungan mereka pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat. Pada akhirnya, kondisi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan wilayah antar provinsi di Indonesia.
3. Pemerintah harus memastikan bahwa semua daerah dapat memperoleh manfaat yang lebih adil dari pertumbuhan ekonomi, karena hal ini memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap ketimpangan antar daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi di daerah yang masih tertinggal, disertai dengan pengembangan sektor ekonomi yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam skala yang lebih besar. Selain itu, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan daerah terhadap satu sektor ekonomi tertentu dengan mendorong pengembangan berbagai sektor potensial sesuai dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing wilayah. Di sisi lain, pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi mensyaratkan adanya perbaikan mutu infrastruktur, peningkatan kualitas modal manusia, dan pemerataan aksesibilitas ekonomi secara berkelanjutan. Upaya komprehensif ini bertujuan agar akselerasi ekonomi tidak hanya mendorong agregat aktivitas pasar di suatu daerah, melainkan turut mewujudkan pembangunan yang inklusif serta menekan jurang ketimpangan regional di Indonesia.

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan metode panel dinamis, Panel VAR (PVAR), VECM, atau metode lain yang relevan untuk menguji dan mengakomodasi kemungkinan adanya hubungan timbal balik serta endogenitas antarvariabel. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara IPM, PAD, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan wilayah.

